



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

## 3 Raperda Dorong Kontribusi Jakarta Global

**JAKARTA (Poskota)** - Pj Teguh Setyabudi menyampaikan jawaban atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda PT JIEP, Raperda Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT JIEP, dan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta.

Pidato penyampaian jawaban dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11).

Teguh melihat keberadaan ketiga Raperda ini akan berkontribusi dalam pembangunan Kota Jakarta sebagai kota global. Kemudian, ia memaparkan jawaban atas dua Raperda terkait PT JIEP.

Menurutnya, pendirian PT JIEP (Perseroan Daerah) bertujuan untuk memaksimalkan peran Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan penyusunan ulang masterplan (remasterplan) untuk kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

"Pemprov DKI perlu memiliki kendali mayoritas dalam upaya menelaraskan rencana strategis PT



Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

JIEP dengan tujuan pembangunan daerah, termasuk inisiatif ekonomi berbasis lingkungan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan penyediaan dukungan infrastruktur," kata Teguh.

Menjawab pertanyaan dan saran dari sejumlah fraksi terkait pembukaan lapangan pekerjaan dan kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pemberdayaan UMKM, Teguh menjelaskan bahwa dengan pengembangan fasilitas baru di kawasan JIEP, akan membuka peluang kerja di

sektor logistik, konstruksi, dan operasional.

Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, fasilitas penelitian dan pengembangan, serta pusat pelatihan tenaga kerja lokal juga akan mendukung pengembangan kawasan Pulogadung. Terutama, dalam menarik investor sektor teknologi dan industri kreatif, serta menciptakan peluang baru bagi UMKM.

Sementara itu, terkait Raperda PT MRT Jakarta, Pj. Gubernur Teguh menekankan, latar belakang

diajukan revisi Perda adalah untuk memperluas cakupan wilayah penyelenggaraan MRT di luar wilayah DKI Jakarta.

Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat (trase Cikarang-Balaraja) yang akan dimulai dengan pembangunan Fase I Medan Satria-Tomang.

Saat ini, MRT Jakarta Lin Utara - Selatan baru melayani Lebak Bulus hingga Bundaran HI, dengan panjang lintasan 16 km sehingga belum optimal dalam memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat dari Utara-Selatan dan sebaliknya.

Diharapkan, ke depan, PT MRT Jakarta dapat melakukan transformasi sebagai sistem integrator untuk mewujudkan sistem angkutan massal yang terintegrasi, mencakup integrasi fisik, rute, tarif dan transaksi, serta kelembagaan.

"Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan fraksi-fraksi terkait potensi pengembangan usaha PT MRT Jakarta pada rancangan perubahan Perda ini sebagai dasar hukum penyelenggaraan MRT Jakarta," pungkasnya. **(Pandi/den)**